



Efektivitas dan Akuntabilitas Dana Pokir dalam Perencanaan Pembangunan Daerah: Studi Kualitatif dari Perspektif Stakeholder Lokal Di Kabupaten Sumbawa

Rina Komala¹, Layali Ihyani²

¹ *Digital Business Department, University of Bumigora, Mataram, Indonesia;*

² *Department of Accounting, University of Bumigora, Mataram, Indonesia*

Kata Kunci

Kata kunci: Dana Pokir, efektivitas, akuntabilitas, perencanaan pembangunan, stakeholder, Sumbawa

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas dan akuntabilitas penggunaan Dana Utama (Pokir) dalam proses perencanaan pengembangan Kabupaten Sumbawa. Pendekatan kualitatif digunakan dalam metode studi kasus melalui wawancara, pengamatan partisipatif, perencanaan dan analisis laporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana Pokir dapat memenuhi upaya masyarakat dan meningkatkan kemampuan representasi DPRD, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan antara lain kurangnya transparansi dalam proses proposal, mekanisme pemantauan yang lemah, dan koordinasi terbatas antara lembaga terkait. Akuntabilitas atas penggunaan dana Pokir seringkali tergantung pada inisiatif individu dan tidak sepenuhnya didukung oleh sistem yang solid. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Dana Pokir dibutuhkan reformasi kelembagaan, memperkuat sistem informasi perencanaan dan partisipasi masyarakat yang lebih aktif. Studi ini berkontribusi pada peningkatan pemahaman pengelolaan Dana Pokir di Kabupaten Sumbawa yang lebih responsif dan integratif.

Keywords

Keywords: Pokir funds, effectiveness, accountability, development planning, stakeholders, Sumbawa

Abstract

The purpose of this study is to analyze the effectiveness and accountability of the use of Main Funds (Pokir) in the development planning process of Sumbawa Regency. A qualitative approach is used in the case study method through interviews, participatory observation, planning and report analysis. The results of the study indicate that Pokir funds can meet community efforts and improve the representation capacity of the DPRD, but still face various challenges including lack of transparency in the proposal process, weak monitoring mechanisms, and limited coordination between related institutions. Accountability for the use of Pokir funds often depends on individual initiatives and is not fully supported by a solid system. Therefore, to improve the effectiveness and accountability of Pokir Funds, institutional reforms are needed, strengthening the planning information system and more active community participation. This study contributes to improving the understanding of the management of Pokir Funds in Sumbawa Regency which is more responsive and integrative.

*Corresponding Author: **Rina Komala¹**, University of Bumigora Mataram, Mataram, Indonesia;

Email: rina.komala@universitasbumigora.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.29303/jseh.v11i2.839>

History Artikel:

Received: 15 Mei 2025 | Accepted: 29 Juni 2025

PENDAHULUAN

Dalam kerangka desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia, peran serta anggota legislatif daerah dalam proses perencanaan pembangunan menjadi semakin signifikan. Salah satu instrumen yang mencerminkan keterlibatan legislatif dalam proses perencanaan adalah Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yaitu aspirasi masyarakat yang ditampung oleh anggota dewan dan diusulkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Secara normatif, Pokir dimaksudkan untuk menjembatani kepentingan masyarakat agar lebih terakomodasi dalam pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 104 (c) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan fungsi anggaran, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan reses dan/atau penjarangan aspirasi masyarakat lainnya dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan kepada kepala daerah sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini selaras dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu daerah administratif di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sedang giat mendorong pembangunan berbasis potensi lokal, pokir menjadi studi kasus yang menarik untuk diteliti karena dikelola dalam konteks perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa dalam kurun waktu tahun 2022 hingga 2024 total dana Pokir yang telah direalisasikan sebesar Rp496.202.000 (empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua ribu rupiah) berupa bantuan kepada kelompok usaha bersama (KUBE) yang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Sumbawa. Hal ini menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dalam pengelolaan dana Pokir, baik dari sisi alokasi, implementasi, maupun pengawasan. Beberapa program pembangunan yang didanai dari Pokir DPRD dinilai telah memberikan dampak positif dalam menjawab kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sumbawa. Teori Akuntabilitas Publik menekankan pentingnya pertanggungjawaban publik dalam pengelolaan anggaran publik (Kim and Jung, 2013), termasuk Dana Pokir meskipun dalam prakteknya masih terdapat tantangan dalam memastikan akuntabilitas penggunaan dana pokir (Dubnick and Yang, 2015). Transparansi mekanisme usulan, verifikasi teknis, hingga proses realisasi anggaran menjadi aspek penting yang perlu ditelaah

secara kritis. Perspektif para pemangku kepentingan lokal, seperti anggota DPRD, perencana daerah, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil, penting untuk dipahami guna mendapatkan gambaran utuh mengenai bagaimana Pokir benar-benar berperan dalam pembangunan daerah di Kabupaten Sumbawa.

Beberapa studi sebelumnya mengindikasikan bahwa meskipun dana Pokir berpotensi besar dalam mendukung pembangunan, pelaksanaannya sering terkendala oleh berbagai faktor seperti lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi, dan kurangnya keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan dan evaluasi penggunaan dana tersebut (Santoso, 2021; Wijaya, 2023). Hal ini berdampak pada efektivitas dana Pokir dalam menciptakan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana Pokir dalam proses perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sumbawa dari perspektif berbagai stakeholder lokal. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik dan praktis dalam merumuskan tata kelola Pokir yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta mendorong terciptanya pembangunan daerah yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana kebijakan penyaluran dana Pokir dijalankan, serta memahami pandangan dan persepsi stakeholder terkait dengan kebijakan ini. Penelitian ini juga berfokus pada analisis dampak kebijakan tersebut terhadap pembangunan daerah. Menurut Sugiyono (2020:9) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sumbawa, yang dipilih karena memiliki karakteristik yang relevan dengan topik penelitian dan di mana kebijakan penyaluran dana Pokir anggota Dewan dilaksanakan. Menurut Sugiyono (2020:105) menyatakan bahwa secara umum terdapat 4 (empat) macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi,

wawancara, dokumentasi dan gabungan/triangularisasi (observasi, wawancara dan observasi). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dibagi menjadi beberapa tahapan.

Tahapan pertama terdiri dari wawancara mendalam (In-Depth Interview), di mana ini dilakukan secara semi-terstruktur dengan para stakeholder yang relevan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi yang mendalam tentang persepsi, pengalaman, dan pandangan para partisipan terkait dengan kebijakan penyaluran dana Pokir. Pertanyaan wawancara disusun fleksibel untuk memungkinkan diskusi terbuka, tetapi tetap fokus pada tujuan penelitian.

Kedua menggunakan observasi partisipatif, yakni observasi terhadap kegiatan yang terkait dengan penggunaan dana Pokir, misalnya dalam forum rapat DPRD Kabupaten Sumbawa atau pertemuan masyarakat, untuk memahami dinamika interaksi antar stakeholder dan bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di lapangan.

Ketiga dengan melaksanakan studi dokumentasi. Yaitu pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan kebijakan penyaluran dana Pokir, seperti dokumen perencanaan, laporan pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan yang sudah ada. Dokumen ini akan memberikan informasi terkait kebijakan, alokasi dana, serta proses pengawasan.

Tahap keempat yakni teknik penentuan informan dalam penelitian, dengan kriteria informan yang berhubungan dengan Efektivitas dan Akuntabilitas Dana Pokir dalam Perencanaan Pembangunan Daerah: Studi Kualitatif dari Perspektif Stakeholder Lokal di Kabupaten Sumbawa maka peneliti menetapkan informan, yaitu:

1. 2 orang Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa
2. 1 orang Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa
3. 1 orang Bendahara Dinas Kabupaten Sumbawa
4. 1 orang Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa
5. 1 orang Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Bukan Korban HIV AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa
6. Ketua KUBE (Kelompok Usaha Bersama)

Tahap kelima yakni validasi data dengan

menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2020:125) peneliti yang melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Setelah dilakukannya wawancara dan pengujian terhadap data primer dan sekunder maka, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan analisa dan pembahasan dari hasil uji dan wawancara yang telah dilakukan. Menurut Sugiyono (2020:131) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, hasil penelitian ini menggambarkan berbagai perspektif dan pandangan yang muncul dari berbagai stakeholder yang terlibat dalam kebijakan penyaluran Dana Pokir Pikiran (Pokir) di Kabupaten Sumbawa. Hasil temuan terbagi dalam beberapa tema utama, yang akan dibahas secara rinci sebagai berikut.

Perspektif Anggota Dewan

Anggota Dewan Kabupaten Sumbawa mayoritas menganggap penyaluran Dana Pokir sebagai bentuk pengabdian mereka terhadap masyarakat. Mereka melihat dana Pokir sebagai sarana untuk mewujudkan aspirasi konstituen mereka dan berkontribusi pada pembangunan daerah. Sebagian besar anggota Dewan mengklaim bahwa dana ini membantu menyelesaikan kebutuhan mendesak di daerah pemilihan mereka, seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Namun, beberapa anggota Dewan juga mengungkapkan bahwa sering kali mereka terhambat oleh kendala administrasi yang kompleks dalam proses pengajuan dana Pokir, yang memperlambat realisasi program-program pembangunan.

Perspektif Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, khususnya pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran, mengungkapkan bahwa penyaluran Dana Pokir memiliki manfaat besar untuk mendukung pembangunan lokal. Namun, mereka juga

mencatat adanya tantangan terkait koordinasi dengan Dewan dan pengawasan terhadap alokasi dana. Beberapa proyek yang didanai oleh Pokir tidak selalu sesuai dengan perencanaan daerah yang telah disusun sebelumnya, yang terkadang menyebabkan ketidaksesuaian antara prioritas pembangunan daerah dengan program yang didanai oleh dana Pokir.

Perspektif Masyarakat Penerima Manfaat

Masyarakat penerima manfaat sebagian besar merasakan dampak positif dari dana Pokir terlihat dari meningkatnya jumlah kelompok usaha bersama yang telah menerima manfaat dana pokir yaitu pada tahun 2022 ada 4 (empat) KUBE dengan total realisasi dana pokir sebesar Rp 97.000.000 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah), kemudian pada tahun 2023 meningkat menjadi 17 (tujuh belas) KUBE dengan total realisasi dana pokir sebesar Rp 196.105.00(Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Lima Ribu Rupiah) dan pada tahun 2024 sebanyak 6 (enam) KUBE dengan total nilai realisasi dana pokir sebesar Rp 300.0000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Perspektif Lembaga Pengawas

Lembaga pengawas, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Ombudsman, mencatat bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana Pokir, masih terdapat celah yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan anggaran. Dalam beberapa kasus, laporan penggunaan dana Pokir tidak cukup jelas dan sulit untuk dipertanggungjawabkan. Hal ini menunjukkan perlunya sistem pengawasan yang lebih ketat dan mekanisme evaluasi yang lebih transparan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran.

Pembahasan

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyaluran Dana Pokir

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya kesenjangan dalam transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana Pokir. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan pengawasan, masih terdapat kekurangan dalam memberikan informasi yang memadai kepada publik mengenai proyek yang didanai oleh dana Pokir. Beberapa anggota Dewan dan pemerintah daerah mengakui pentingnya transparansi, namun di sisi lain, masyarakat mengungkapkan kekhawatiran bahwa dana tersebut sering kali digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Hal ini sejalan dengan temuan dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa penggunaan dana Pokir sering kali dikaitkan dengan tujuan politik (Wibowo dan Ridho, 2024).

Keberadaan mekanisme pengawasan yang lemah juga menjadi tantangan dalam memastikan akuntabilitas penggunaan dana ini. Lemahnya

pengawasan dan kontrol dapat menyebabkan terjadinya ketidakpastian mengenai bagaimana dan untuk apa dana tersebut digunakan. Pemerintah daerah dan lembaga pengawas perlu mengembangkan sistem pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan bahwa penggunaan dana Pokir benar-benar menguntungkan masyarakat dan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Partisipasi Stakeholder dalam Proses Penyaluran Dana Pokir

Perspektif yang diperoleh dari berbagai stakeholder menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi penyaluran dana Pokir. Selama ini, proses perencanaan sering kali tidak melibatkan secara maksimal masyarakat sebagai penerima manfaat utama. Hal ini terlihat dari ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dan proyek yang didanai dengan dana Pokir. Beberapa masyarakat merasa bahwa mereka tidak dilibatkan dalam menentukan prioritas pembangunan, yang menyebabkan beberapa proyek tidak memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan evaluasi penggunaan dana Pokir dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Sejalan dengan temuan dari penelitian sebelumnya (Fitria, et.al., 2025), proses partisipasi yang lebih inklusif dapat memperkuat legitimasi kebijakan dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan.

Implikasi Dana Pokir terhadap Pembangunan Daerah

Dari perspektif pembangunan daerah, dana Pokir memiliki dampak positif dalam hal meningkatkan infrastruktur dan fasilitas publik di Kabupaten Sumbawa. Banyak proyek yang dibiayai oleh dana Pokir telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti perbaikan jalan, pembangunan jembatan, dan fasilitas pendidikan serta kesehatan. Namun, dampak ini sering kali terbatas pada daerah-daerah tertentu yang memiliki prioritas lebih tinggi di kalangan anggota Dewan.

Tantangan utama yang muncul adalah ketidakseimbangan distribusi manfaat dari dana Pokir. Beberapa daerah yang tidak memiliki anggota Dewan dengan posisi strategis sering kali tertinggal dalam memperoleh manfaat dari dana ini. Ketimpangan dalam alokasi dana Pokir dapat memperburuk ketidakmerataan pembangunan di Kabupaten Sumbawa, dan ini harus menjadi perhatian dalam perencanaan anggaran daerah. Sejalan dengan penelitian oleh Churniawan (2024), ketimpangan dalam distribusi dana dapat menciptakan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat yang merasa terabaikan.

Rekomendasi untuk Peningkatan Kebijakan

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini menyarankan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan penyaluran dana Pokir di Kabupaten Sumbawa yakni sebagai berikut.

1. Peningkatan Transparansi dan Pengawasan. Pemerintah daerah dan lembaga pengawas perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap penggunaan dana Pokir, serta memastikan bahwa informasi terkait proyek yang dibiayai oleh dana ini dapat diakses oleh publik.
2. Partisipasi Masyarakat yang Lebih Inklusif. Melibatkan masyarakat lebih aktif dalam perencanaan dan evaluasi penggunaan dana Pokir akan meningkatkan relevansi dan efektivitas proyek-proyek pembangunan.
3. Keseimbangan dalam Alokasi Dana. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kembali mekanisme distribusi dana Pokir agar alokasi dana dapat lebih merata dan memenuhi kebutuhan semua daerah di Kabupaten Sumbawa. Pembahasan terhadap hasil penelitian pada masyarakat disajikan dalam bentuk uraian bahasan sesuai tujuan kegiatan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hasil kegiatan juga membahas respon masyarakat baik yang sifatnya mendukung (positif) maupun hambatan (negative) yang dapat didukung dengan satu judul gambar saja (dapat berisikan beberapa gambar kegiatan). Jika diperlukan table, dapat pula disajikan table bersangkutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penyaluran Dana Pokir (Pokir) anggota Dewan di Kabupaten Sumbawa, dengan melihat perspektif berbagai stakeholder yang terlibat serta implikasinya terhadap pembangunan daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, dapat disimpulkan beberapa hal penting:

1. Persepsi Positif terhadap Dana Pokir. Kebijakan penyaluran Dana Pokir oleh anggota Dewan di Kabupaten Sumbawa mendapat respon positif dari sebagian besar anggota Dewan dan masyarakat penerima manfaat. Anggota Dewan memandang Dana Pokir sebagai sarana untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan mendorong pembangunan daerah. Masyarakat juga merasakan manfaat dari proyek-proyek pembangunan yang dibiayai melalui dana ini, seperti peningkatan

infrastruktur dan fasilitas publik.

2. Tantangan dalam Pengelolaan dan Pengawasan. Meskipun terdapat manfaat yang signifikan, penelitian ini menemukan adanya sejumlah tantangan dalam pengelolaan dan pengawasan dana Pokir. Beberapa stakeholder mengungkapkan kekhawatiran mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut. Masyarakat, terutama yang tidak terlibat langsung dalam proses perencanaan, merasa kurang mendapat informasi mengenai bagaimana dan untuk apa dana Pokir digunakan. Selain itu, pengawasan yang lemah memungkinkan terjadinya penyalahgunaan atau ketidaksesuaian dalam alokasi dana.
3. Keseimbangan Alokasi Dana. Penyaluran Dana Pokir sering kali tidak merata, dengan sebagian daerah yang memiliki anggota Dewan dengan posisi politik yang kuat mendapatkan lebih banyak manfaat. Hal ini dapat memperburuk ketidakmerataan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Sumbawa, yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memastikan distribusi dana yang lebih adil dan merata.
4. Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan. Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi penggunaan Dana Pokir. Dengan melibatkan masyarakat lebih aktif, maka proyek yang didanai akan lebih relevan dengan kebutuhan riil mereka. Hal ini juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kebijakan, serta memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.
5. Rekomendasi Kebijakan. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal untuk meningkatkan efektivitas kebijakan penyaluran Dana Pokir yakni pertama memperkuat mekanisme pengawasan dan transparansi dalam penggunaan Dana Pokir. Kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi proyek yang didanai oleh Dana Pokir. Ketiga, menyusun kebijakan yang memastikan alokasi dana Pokir yang lebih merata di seluruh daerah Kabupaten Sumbawa. Keempat,

meningkatkan koordinasi antara Dewan, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memastikan bahwa prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Secara keseluruhan, meskipun Dana Pokir memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah, masih terdapat sejumlah isu yang perlu diperbaiki untuk memaksimalkan manfaatnya. Oleh karena itu, perbaikan dalam hal transparansi, partisipasi masyarakat, serta distribusi yang lebih adil akan meningkatkan efektivitas kebijakan ini dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Sumbawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Churniawan, E. (2024). *Dinamika Money Politics di Masyarakat: Perspektif Relasi Kuasa*. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 4(2), 78-96.
- Dubnick, M. J., & Yang, K. (2015). The pursuit of accountability: Promises, problems, and prospects. In *The state of public administration* (pp. 171-186). Routledge.
- Fitria, L., Tarigan, C.A.B., Ramadhan, A.W., Nurbaiti. (2025). *Peran Sistem Informasi Manajemen Data dalam Meningkatkan Transparansi dan Kepercayaan Publik pada Lembaga Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)*. *Jurnal Mahasiswa Kreatif* Volume 3, Nomor 3, Mei 2025 E-ISSN : 2986-3066; P-ISSN : 2986-304X, Hal 01-14 DOI: <https://doi.org/10.59581/jmk-widyakarya.v3i3.4947>
- Kim, J. W., & Jung, K. (2013). Does civic engagement resolve accountability dilemmas in local governance. *International Journal of Policy Studies*, 4(1), 87-104.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Sugiyono.(2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Santoso, A. (2021). *Analisis Efektivitas Dana Pokir dalam Mendorong Pembangunan Infrastruktur Daerah*. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 120-135.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Wibowo, A., Situmorang, T., & Ridho, H. (2024). Politik Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Mengatasi Permasalahan Infrastruktur di Provinsi Sumatera Utara. *PERSPEKTIF*, 13(4), 1110-1120.
- Wijaya, R. (2023). *Akuntabilitas Penggunaan Dana Pokir DPRD: Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 45-62.